

“Realitas Hukum”, 15 Desember 2015, <https://tokoh.id/publikasi/opini/realitas-hukum/>, diakses 6 Februari 2019.

“RI Bakal Sulit Ikuti Jerman”, 5 Januari 2018, <https://katadata.co.id/berita/2018/01/05/ri-bakal-sulit-ikuti-jerman-atasi-ujaran-kebencian-lewat-denda-tinggi>, diakses 6 Februari 2019.

“Selama 2017 Polri Tangani 3.325 Kasus Ujaran Kebencian”, 29 Desember 2017, <https://news.detik.com/berita/d-3790973/selama-2017-polri-tangani-3325-kasus-ujaran-kebencian>, diakses 6 Februari 2019.

Soedarto. (1986). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Verkhovsky, Alexander. (2016). *Criminal Law on Hate Crime, Incitement to Hatred and Hate Speech in OSCE Participating States*. The Hague: SOVA Center.



Prianter Jaya Hairi
prianter.hairi@dpr.go.id

Prianter Jaya Hairi, S.H., LL.M., menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang tahun 2006 dan S2 Program Pascasarjana di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 2009. Saat ini bekerja sebagai Peneliti Muda Bidang Hukum pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: “Kebijakan Kriminalisasi terhadap Tindakan Hakim dalam RUU tentang Mahkamah Agung” (2014), “Urgensi Penguatan Kewenangan Komnas HAM” (2014), “Penegakan Hukum di Laut oleh Pemerintah Daerah” (2015).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.

KRISIS VENEZUELA DAN KEPENTINGAN NASIONAL INDONESIA

Adirini Pujayanti

Abstrak

Krisis yang terjadi di Venezuela saat ini, selain telah memperburuk kondisi negara tersebut, juga telah melahirkan dua kepemimpinan. Pertentangan dua kepemimpinan antara Nicholas Maduro dan Juan Guaido menguat karena adanya intervensi politik asing di Venezuela. Akibat krisis politik di Venezuela, sejak 2015 telah terjadi eksodus rakyat Venezuela ke negara-negara tetangganya. Telah terbentuk pula dua kubu internasional dalam menyikapi krisis politik di Venezuela. Amerika Serikat (AS) berupaya menempatkan krisis politik Venezuela sebagai masalah internasional di Dewan Keamanan (DK) PBB. Namun setiap tindakan DK PBB yang bertujuan mengatasi krisis Venezuela mendapat veto Rusia dan China. Sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB, Indonesia berupaya mencari solusi damai atas krisis yang terjadi di Venezuela dengan meminta kedua pihak yang berkonflik untuk menahan diri. Tulisan ini akan menganalisis respons internasional terhadap krisis politik yang terjadi di Venezuela dan bagaimana Indonesia harus menyikapinya.

Pendahuluan

Sejak diselenggarakan pemilu presiden 20 Mei 2018, krisis politik di Venezuela semakin parah. Kondisi tersebut semakin buruk setelah Nicholas Maduro dilantik sebagai presiden Venezuela untuk periode kedua pada 10 Januari 2019. Keabsahan pemilu tersebut diragukan karena dinilai sarat kecurangan dan diboikot pihak oposisi. Majelis Nasional (Parlemen) Venezuela menyatakan pemerintahan Maduro tidak sah. Sejak 23 Januari 2019, pemimpin

oposisi sekaligus Ketua Majelis Nasional Venezuela, Juan Guaido, memproklamasikan diri sebagai pejabat presiden sementara selama masa transisi menuju pemilu ulang. Dualisme kepemimpinan dan intervensi asing semakin memperburuk krisis ekonomi dan politik di Venezuela. Eksodus penduduk Venezuela ke negara-negara sekitarnya sejak tahun 2015 mulai dirasakan mengganggu kedamaian di kawasan Amerika Latin. Krisis politik Venezuela menjadi salah satu isu yang



dihadapi Indonesia selaku Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan (DK) PBB.

Pemerintahan Presiden Nicholas Maduro selama ini meneruskan kebijakan sosialis yang dilaksanakan pendahulunya Hugo Chaves sejak tahun 1988. Keduanya adalah satu dari sedikit pemimpin Amerika Latin yang berani bersikap menentang Amerika Serikat (AS). Pemerintahan sosialis Maduro dianggap sebagai penyebab perekonomian Venezuela terpuruk. Venezuela mengalami hiperinflasi hingga 10 juta persen, krisis produksi minyak, tingkat kelaparan dan kriminalitas yang tinggi, hingga berujung pada kemiskinan. PBB menyatakan krisis ekonomi dan politik yang terjadi di Venezuela telah menyebabkan terjadinya krisis kemanusiaan yang menimbulkan arus pengungsi ke negara sekitarnya. Sementara Pemerintahan Maduro menyangkal pernyataan tersebut dan menolak bantuan kemanusiaan.

William Spindler, Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR), menyatakan bahwa sejak 2015 kurang lebih tiga juta penduduk telah meninggalkan Venezuela. Eksodus tersebut sebagian besar dilakukan ke Kolombia sekitar 1,1 juta jiwa (beritasatu.com., 9 November 2018). Selebihnya menyebar ke Peru, Panama, Ecuador, Chile, Argentina, dan Brazil. Pemerintah Kolombia memperkirakan, jika eksodus terus berlanjut, pada tahun 2021 negaranya akan menerima limpahan empat juta penduduk Venezuela (Suara Pembaruan, 25 Januari 2019). Sementara Kepala Lembaga Hak Asasi Manusia PBB, Michaelle Bachelet, mengungkapkan

kekhawatirannya terhadap situasi Venezuela. Ia menyerukan investigasi independen atas klaim bahwa pasukan kepolisian khusus (FAES) Venezuela menggunakan kekuatan berlebihan untuk menumpas para pengunjuk rasa. Tulisan ini akan menganalisis respons internasional terhadap krisis politik yang terjadi di Venezuela dan bagaimana Indonesia harus menyikapi krisis tersebut.

Respons Internasional

Pemilu presiden Venezuela pada tahun 2018 tidak diakui Kanada, Uni-Eropa, dan beberapa negara di Amerika Latin. Tekanan politik internasional semakin kuat setelah AS bergabung menolak hasil pemilu tersebut. Saat itu, Uni Eropa menuntut adanya pemilu ulang dengan tenggat waktu yang ditentukan 25 Januari 2019. Jika pemilu tersebut jadi dilaksanakan akan dijamin dengan kehadiran pengamat internasional untuk menghindari konfrontasi dan banyak korban. Tanpa ada pemilu ulang, yang memang tidak jadi dilaksanakan, Uni Eropa akan mendukung Guaido.

Konflik politik Venezuela tidak terlepas dari campur tangan AS di negara tersebut. Berdasarkan sejarah, AS merupakan negara sangat berpengaruh di Amerika Latin. Kebijakan pemerintahan sosialis Presiden Maduro ditanggapi dengan intervensi ekonomi berupa sanksi larangan perusahaan AS melakukan transaksi ke Venezuela, termasuk ke perusahaan minyak Venezuela, PDVSA. Dengan adanya sanksi tersebut, Venezuela kehilangan sumber devisa penting bagi negaranya. Di bidang politik, AS

mendukung tokoh oposisi Juan Guaido, sehingga mendapat pengakuan politik dari banyak negara, termasuk Organisasi Negara-negara Amerika Selatan (OAS). Saat ini pihak oposisi Juan Guaido telah didukung 60 negara. AS juga mendesak negara-negara lain memutuskan hubungan keuangan dengan pemerintah Maduro. Pemerintah AS diduga mendanai dan membantu mengoperasikan pemerintahan oposisi Juan Guaido. Dukungan AS terhadap Juan Guaido menyebabkan Pemerintahan Maduro memutuskan hubungan diplomatik Venezuela dengan AS.

Di lain pihak Pemerintahan Venezuela mendapat dukungan dari China, Rusia, Kuba, Suriah, Turki, Bolivia, dan Iran. China telah meminjamkan lebih dari 50 miliar dollar AS ke Venezuela melalui perjanjian pembayaran dengan minyak. Sementara Rusia telah meminjamkan 17 miliar dollar AS sejak tahun 2006 (Suara Pembaruan, 25 Januari 2019). Rusia menyatakan bahwa telah terjadi intervensi politik terhadap Venezuela yang merdeka dan berdaulat. Rusia membantu membangun persenjataan militer Venezuela dan berpartisipasi dalam parade militer yang diselenggarakan pemerintah Maduro. Rusia menekankan solusi krisis Venezuela adalah dialog antara Pemerintahan Maduro dan pihak oposisi di meja perundingan.

Kepentingan Indonesia di Kawasan Amerika Latin

Indonesia menyatakan keprihatinnya terhadap krisis Venezuela. Keprihatinan Indonesia tersebut diungkapkan dalam dua pernyataan. Pertama, sebaiknya isu Venezuela dibahas per kawasan

dalam agenda “Kerja sama antara PBB dan Organisasi Regional dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional”. Kedua, Indonesia menyatakan konsisten dalam menegakkan dan menghormati prinsip-prinsip non-intervensi, kedaulatan dan integritas teritorial semua negara, termasuk dalam isu Venezuela. Dengan memprioritaskan kepentingan rakyat Venezuela, Indonesia berupaya mencari solusi damai dengan cara meminta setiap pihak yang berseteru menahan diri, untuk menghindari eskalasi ketegangan yang akan memperburuk situasi lebih lanjut. Indonesia menyarankan semua pemangku kepentingan yang relevan untuk melakukan dialog nasional secara transparan dan demokratis.

Pernyataan Indonesia di DK PBB tersebut merupakan bentuk konsistensi politik Indonesia sebagai anggota dari Gerakan Nonblok. Sikap abstain Indonesia merupakan upaya untuk tidak terlibat dalam perebutan pengaruh dua kekuatan politik dunia, yaitu AS dan Rusia dalam kasus Venezuela. Indonesia berupaya mengingatkan DK PBB sebagai organisasi penting yang sangat berpengaruh di dunia untuk bersikap netral. Sikap tersebut konsisten dengan kebijakan Indonesia yang telah menetapkan fokus dalam diplomasi di DK PBB, yakni memelihara perdamaian, sinergi antara organisasi kawasan dan PBB, pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), dan penanganan kejahatan lintas batas, radikalisme, serta terorisme. Dalam upaya turut memelihara perdamaian tersebut, Indonesia menyerukan semua pihak untuk menahan diri

dan tidak mengambil tindakan yang memperburuk keadaan, serta tetap menghormati kedaulatan, tidak mencampuri urusan dalam negeri Venezuela dan mendengar suara rakyat. Indonesia menyerukan segera dilakukan proses politik yang demokratis, transparan, dan kredibel.

Kebijakan Indonesia terhadap krisis Venezuela dengan meminta semua pihak untuk menunggu perkembangan dan menahan diri adalah sudah tepat, karena pengakuan politik yang diberikan AS dan sekutunya belum dapat mengubah status hukum pemerintahan Maduro. Selain itu, pengaruh Presiden Maduro cukup kuat tertanam di tubuh militer dan Majelis Konstituante Nasional. Pengakuan secara sepihak Juan Guaido sebagai presiden sementara Venezuela akan melanggengkan konflik di negara tersebut. Begitu pula pengakuan internasional terhadap Juan Guaido akan dapat memunculkan perang saudara di Venezuela.

Kemampuan Indonesia sebagai mediator di berbagai konflik internasional dapat diterapkan untuk membantu penanganan konflik Venezuela. Di tengah kebuntuan isu Venezuela, Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB dapat menjadi pionir untuk mengajak setiap pihak yang bersengketa membuka dialog dan duduk bersama. Keberhasilan upaya Indonesia ini nantinya akan menjadi politik prestise tersendiri bagi Indonesia di kancah internasional.

Indonesia memiliki kepentingan terhadap krisis Venezuela, karena hal ini terkait pula dengan kepentingan nasional. Saat ini pemerintah Indonesia tengah mencari pasar

ekspor alternatif. Kawasan Amerika Latin tengah ditargetkan menjadi pasar ekspor alternatif tersebut. Krisis Venezuela dan terpecahnya negara-negara di kawasan Amerika Latin dalam isu tersebut dapat mengganggu upaya diplomasi ekonomi Indonesia di kawasan tersebut. Jika Indonesia mampu berperan aktif membantu menyelesaikan krisis Venezuela secara damai, maka hal tersebut akan membuka celah lebih lebar bagi masuknya kepentingan ekonomi Indonesia di kawasan tersebut.

Saat ini kawasan Amerika Latin memang menjadi salah satu tujuan diplomasi ekonomi Indonesia. Hal ini sejalan dengan arah Pemerintahan Presiden Joko Widodo agar Indonesia membuka keran ekspor ke pasar-pasar atau negara non-tradisional. Salah satu tujuan diplomasi ekonomi tersebut adalah meningkatkan volume dan kualitas perdagangan Indonesia.

Sejak tahun 2017, Kementerian Luar Negeri melalui Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Amerika dan Eropa, Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (P2K2 Amerika dan Eropa, BPPK), melakukan kajian mandiri tentang potensi dan peluang kerja sama ekonomi di Amerika Latin. Kawasan Amerika Latin terdiri dari 33 negara dan memiliki luas benua sebesar 42 juta km persegi. Jumlah populasinya mencapai 634 juta jiwa (2015), di mana 60% di antaranya terkonsentrasi di tiga negara, yakni Brasil, Meksiko, dan Kolombia. Total GDPnya lebih dari USD5,3 triliun (2015). Selain itu, di kawasan ini terdapat tiga perekonomian yang masuk dalam

kelompok G-20, yakni Brasil, Meksiko, dan Argentina. Oleh karena itu, Indonesia perlu secara sistematis dan terukur mengambil strategi dan pendekatan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi kawasan Amerika Latin dengan melihat besarnya potensi di kawasan tersebut. Hal ini membuat Indonesia harus mampu meningkatkan hubungan baik dengan semua negara Amerika Latin, termasuk Venezuela.

Dalam era globalisasi saat ini, telah terbuka peluang untuk meningkatkan volume perdagangan dan investasi antarkawasan. Manuver politik negara-negara sosialis di Amerika Latin yang hendak lepas dari ketergantungan terhadap kebijakan AS telah memberikan warna baru bagi kawasan tersebut. Hal ini membuka peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan kerja sama dengan negara-negara di kawasan tersebut. Indonesia sebagai tokoh GNB dan kerja sama internasional dalam kerangka Kerja sama Selatan-Selatan seharusnya dapat mengambil kesempatan tersebut.

Penutup

Mengingat kawasan Amerika Latin merupakan kawasan pasar nontradisional bagi kepentingan ekonomi Indonesia, Pemerintah Indonesia perlu memainkan peran aktif dalam penyelesaian krisis di Venezuela, sehingga mendekatkan Indonesia dengan negara-negara di kawasan Amerika Latin. Keterlibatan Indonesia dalam penyelesaian krisis Venezuela juga akan semakin mempertegas posisi Indonesia sebagai negara penting di GNB dan mediator perdamaian yang patut diperhitungkan.

DPR perlu meminta Pemerintah Indonesia untuk memberi perhatian terhadap krisis Venezuela yang telah menyebabkan terjadinya perang resolusi antara AS dan Rusia di DK PBB. Sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB, Indonesia diharapkan berinisiatif mengajak setiap pihak yang bersengketa duduk bersama membangun dialog untuk mencari solusi damai atas krisis yang terjadi di Venezuela. Kemampuan diplomasi Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB akan diuji dan keberhasilannya akan menjadi prestasi bagi posisi Indonesia di dunia internasional.

Referensi

- “Ada 2 Presiden di Venezuela, Ini Sikap Militer”, *sinonews.com.*, 24 Januari 2019, <https://international.sinonews.com/read/1373082/42/ada-2-presiden-di-venezuela-ini-sikap-militer-1548284471>, diakses 28 Januari 2019.
- “Amerika Latin Jadi Pasar Prospektif Indonesia”, *ugm.ac.id.*, 11 Mei 2018, <https://www.ugm.ac.id/id/news/16196-amerika.latin.jadi.pasar.prospektif.Indonesia>, diakses 29 Januari 2019.
- “Dinilai Potensial, Indonesia Bidik Peluang Ekonomi di Amerika Latin”, *okezone.com.*, 28 September 2017, <https://economy.okezone.com/read/2017/09/28/320/1784750/dinilai-potensial-indonesia-bidik-peluang-ekonomi-di-amerika-latin>, diakses 12 Februari 2019.
- “Gedung Putih Peringatkan Pemerintahan Maduro”,

Media Indonesia, 9 Januari 2019, hal. 20.
 “Maduro hits back at dissent”, *The New York Times*”, 1 Februari 2019, hal.1.
 “Mayoritas Negara UE Dukung Guaido”, *Republika*, 6 Februari 2019, hal. 7.
 “Menanti Kiprah Diplomasi Indonesia”, *Kompas*, 30 Januari 2019, hal. 4.
 “Paska Kudeta - Krisis Venezuela Berlanjut ke DK PBB”, *Kompas*, 27 Januari 2019, hal. 4
 “PBB: Migran Pengungsi Venezuela Tembus 3 Juta Jiwa”, *beritasatu.com.*, 9 November 2018, <https://sp.beritasatu.com/home/pbb-migran-pengungsi-venezuela-tembus-3-juta-jiwa/127069>, diakses 12 Februari 2019.

“Sejumlah Negara Kecam Campur Tangan Asing”, *Suara Pembaruan*, 25 Januari 2019, hal. 4.
 “Statement by H.E Ambassador Dian Triansyah Djani Permanent Representative of the Republic of Indonesia United Nations Security Council Meeting on the situation in the Bolivarian Republic of Venezuela”, *kemlu.go.id.*, 26 Januari 2019, <https://www.kemlu.go.id/newyork-un/en/indonesia-united/perdamaian-keamanan/Pages/Statement-at-The-United-Nations-Security-Council-Meeting-on-the-situation-in-the-Bolivarian-Republic-of-Venezuela.aspx>, diakses 12 Februari 2019.



Adirini Pujayanti
adirini.pujayanti@dpr.go.id

Dra. Adirini Pujayanti, M.Si., menyelesaikan pendidikan S1 Hubungan Internasional, Universitas Nasional pada tahun 1992 dan pendidikan program Magister (S2) Kajian Wilayah Amerika, Universitas Indonesia pada tahun 2002. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Madya Masalah-Masalah Hubungan Internasional pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: “Kebijakan Luar Negeri Kerja Sama Teknik Selatan-Selatan dan Manfaatnya Bagi Indonesia” (2015), “Parlemen dan Interfaith Dialogue: Upaya Menjaga Stabilitas Keamanan dan Perdamaian Dunia” (2015), “Diplomasi Ekonomi Bidang Perdagangan Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo” (2015), dan “Ekonomi Kreatif sebagai Nation Brand Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN” (2016).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
 ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.